

KREDIT MUDAH DAN MURAH BAGI MASYARAKAT



**SUSIN, SANSU & KERUPUK SUSU
PRIMADONA KABUPATEN SINJAI,
SULAWESI SELATAN**

Susin, Sansu, and Milk Crackers:
The Stars of Sinjai, Sulawesi Selatan

**AIR SUDAH DEKAT,
SEHAT PUN JADI MUDAH!**

When water sources are closer,
being healthy is easier!

**STAGNASI ANGKA
KEMISKINAN**

Stagnation of Poverty
Statistics

**KOPERNIK: MEMBAWA
PENGLIHATAN DAN
IDE-IDE BAIK
MENJADI FOKUS**

The Kopernik: Bringing eyesight
and good ideas into focus

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X

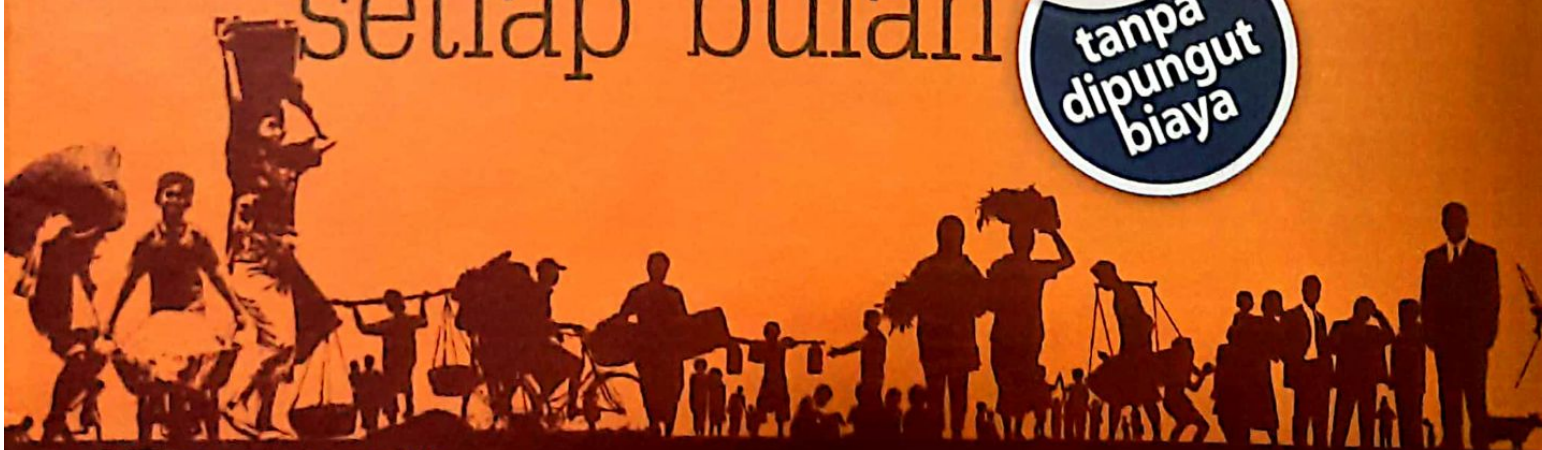


- 1 **Salam dari Makassar**
Greetings from Makassar
- 2 **Tanggapan Anda**
Your Feedback
- 3 **Susin, Sansu, dan Kerupuk Susu Primadona Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan**
Susin, Sansu, and Milk Crackers: The Stars of Sinjai, Sulawesi Selatan
- 5 **Citra Hidup Tribuana di Alor**
Citra Hidup Tribuana in Alor
- 6 **BLUD Harum: "Grameen Bank"nya Kendari**
BLUD Harum: The Grameen Bank of Kendari
- 7 **Motif Sosiologi Peternakan Babi bagi Masyarakat Arfak Manokwari**
Sociological Motives for Pig Farming for the Arfak people of Manokwari
- 9 **Kerjasama Bappeda - German Development Service di Kabupaten Lombok Tengah-NTB**
BAPPEDA - German Development Service Cooperation in Lombok Tengah District, NTB
- 11 **Stagnasi Angka Kemiskinan**
Stagnation of Poverty Statistics
- 13 **SETELAH 30 TAHUN Sekarang Saatnya Bercerai dengan Air Yang Mengandung Besi dan Mangan**
AFTER 30 YEARS: Now Is The Time Be Rid Of Iron And Mangan In Our Water Supply
- 16 **Laporan Terbaru Bank Dunia**
The world Bank new reports
- 17 **KOPERNIK: Membawa penglihatan dan ide-ide baik menjadi fokus**
The Kopernik: Bringing eyesight and good ideas into focus
- 19 **Air Sudah Dekat, Sehat pun Jadi Mudah!**
When water sources are closer, being healthy is easier!
- 22 **Penanggulangan Trafficking di Sulawesi Utara**
Trafficking Prevention in North Sulawesi
- 24 **Hutan Lambusango, Sulawesi Tenggara**
Lambusango Forest, Southeast Sulawesi
- 26 **Wajah KTI**
Face of Eastern Indonesia
- 27 **Peluang**
Opportunity
- 28 **Batukar.info Update**
- 29 **Profil LSM**
Pusat Studi & Pengembangan Sumberdaya Manusia Mataram
Centre for Study and Development of Human Resources Mataram
Events in BaKTI
Info Book



KIRIMKAN DATA DIRI ANDA (ORGANISASI, JABATAN, NOMOR HP, ALAMAT EMAIL) LENGKAP DENGAN ALAMAT POS YANG JELAS DAN DISERTAI DENGAN KODE POS MELALUI EMAIL BAKTINEWS@BAKTI.ORG ATAU SMS 085255776165

Dapatkan BaKTI News setiap bulan



dan karenanya keadaan miskin dalam keluarga dapat dibenahi. Hingga Desember 2009, nasabah perempuan berjumlah 4.780 orang atau 96 persen dari total jumlah nasabah BLUD Harum.

Karena tidak mensyaratkan hal yang terlalu rumit bagi para anggotanya, membangun kepercayaan menjadi hal yang penting. Walaupun syarat yang diberikan untuk menerima bantuan dana adalah cukup ringan, Tim Kajian Usaha dari BLUD Harum tetap melakukan tinjauan usaha dan kajian besaran modal yang akan diberikan.

Pengembalian pinjaman kerap menjadi masalah yang dihadapi Koperasi Kredit. Menyiasati hal ini, BLUD Harum punya kiat yang cukup jitu. Dalam kelompok peserta BLUD, hanya dua atau tiga dari lima orang anggota kelompok yang diberikan pinjaman terlebih dahulu. Setelah tingkat pengembalian mencapai 80 persen, barulah dua atau tiga anggota lainnya bisa diberikan pinjaman. Karenanya orang yang belum diberikan pinjaman dapat memotivasi kepada peminjam sebelumnya untuk disiplin mengembalikan pinjaman. Cara ini terbilang cukup efektif sebab hingga penghujung tahun 2009, tingkat pengembalian nasabah mencapai 72 persen atau Rp. 5.106.575.000 dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 7.011.500.000 dan jumlah jasa yang diterima sebesar Rp. 391.239.000.

Di tahunnya yang ketiga, BLUD Harum merupakan tumpuan masyarakat miskin kota Kendari. Banyaknya jumlah kelompok pengusaha kecil menengah yang kini menjadi anggota BLUD Harum dan tingkat pengembalian nasabah yang relatif tinggi menunjukkan indikator yang menggairahkan bagi upaya pengentasan kemiskinan di kota ini.

INFO LEBIH LANJUT

Syahri & Drs. Anifin Baedi adalah Pimpinan BLUD & Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Kendari melalui Telepon 0401-328054
Penulis dapat dihubungi melalui email fitri_elsadawi@yahoo.com

assistance are not stringent, the BLUD Business Inspection Team continually conducts reviews and studies of the amount of capital that given.

Repayment of loans is often a problem faced by credit cooperatives. To get around this, BLUD Harum has fairly effective methods. Of the BLUD members in the group, only two or three of the five members of the group are given a loan at first. After the return rate reaches 80 percent, then two or three other members may be granted a loan. Therefore, anyone who has not been given a loan is motivated to restore discipline of repayment. This method is quite effective because, at the end of 2009, the rate of return for customers had reached 72% ,or Rp. 5,106,575,000 of the total funds disbursed, which amounted to Rp. 7,011,500,000 and the number of services received equalled Rp. 391,239,000.

In its third year, BLUD Harum is the cornerstone for the poor in Kendari. A large number of small and medium entrepreneurs are now members of BLUD Harum and the customer return rate is high, indicating hope in the effort to alleviate poverty in this city.

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT



Oleh Dr. Ir. Mulyadi, M.Si

Bagi masyarakat Papua, babi adalah jenis hewan yang penting, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Mulal dari menjadi penanda status sosial sebuah keluarga hingga ke sumber mata pencaharian keluarga. Dalam kebudayaan Papua, babi juga menjadi pelengkap berbagai ritual dan upacara adat.

Masyarakat Papua beternak babi untuk meningkatkan pendapatan mereka dan pemenuhan gizi masyarakat. Dibandingkan dengan konsumsi daging ternak lainnya, konsumsi daging babi di kota Manokwari, Papua Barat, pada tahun 2006 mencapai 58 persen total konsumsi daging.

Motif Sosiologi Peternakan Babi bagi Masyarakat Arfak Manokwari

Sociological Motives for Pig Farming for the Arfak people of Manokwari

Masyarakat Arfak (Suku Hatam, Meyah, Moile, Shoub) merupakan suku dominan di Kabupaten Manokwari yang pekerjaan utamanya adalah berladang dan beternak babi. Tidak ada motif ekonomi bagi mereka untuk beternak babi. Bagi mereka babi lebih bernilai sosial-budaya seperti menjadi mas kawin dan alat perdamaian dalam sengketa konflik adat. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging, masyarakat Arfak biasanya berburu babi hutan, rusa, ular anaka jenis burung kanguru pohon atau landak.

Ternak babi bagi masyarakat Arfak adalah harta kekayaan pertama dan utama. Babi adalah hewan yang pertama kali dipelihara oleh nenek moyang suku Arfak dan dijadikan sebagai harta (Salabai, 2009). Oleh sebabnya babi lokal di Papua (*Sus papuensis*) atau babi hutan (*Sus nigra*) memiliki nilai yang sama tinggi dengan seorang anak manusia yang menyusui kepada ibunya. Di kampung-kampung anak babi bahkan diberi air susu ibu, diberi nama seperti nama orang, dipanggang bahkan dimandikan layaknya manusia.

Sebagai alat untuk perdamaian, masyarakat Arfak hanya menggunakan babi untuk menyelesaikan sengketa perzinahan. Menurut pandangan suku Arfak, perzinahan adalah hal yang dilarang serta selain pembunuhan, pencurian, dan kawin lari. Perzinahan dapat berakhir dengan permusuhan yang berlanjut hingga ke keturunannya masing-masing pihak, bahkan pembunuhan.

Untuk mengatasi permusuhan atau konflik akibat perzinahan, laki-laki yang melakukan perzinahan harus menyiapkan babi di halaman rumahnya. Babi itu akan dibunuh dengan panah dan barang lalu digotong sampai hancur oleh suami dan istri korban. Dengan cara ini, amarah kemarahan para keluarga dialihkan pada ternak babi untuk menghindari jatuhnya korban nyawa manusia. Setelah itu, barulah kepala suku mendamaikan kedua belah pihak dan memusnahkan tidak terjadi lagi perselisihan.

Babi bernilai tinggi bagi masyarakat Arfak karena fungsinya sebagai mas kawin. Seorang laki-laki Arfak harus menyerahkan setidaknya lima ekor babi sebagai mas kawin. Walaupun nantinya mas kawin akan menjadi milik kedua mempelai, namun dalam masa cara memamer masyarakat suku Arfak, mas kawin selalu diserahkan kepada ibu mertua sebagai penghormatan atas jerih payahnya melahirkan, memelihara, dan membesarkan anak gadisnya.

Walaupun bernilai tinggi, keberadaan ternak babi juga menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat Arfak, terutama karena hewan ini tidak dipelihara di dalam kandang. Karena bebas berkeliaran, babi kerap dianggap hama karena merusak tanaman di pekarangan rumah dan kebun penduduk. Akibatnya sering terjadi konflik antara pemilik ternak babi dengan pemilik kebun yang dirusak. Konflik yang timbul dapat membesar menjadi pertikaian antar keluarga bahkan perang antar suku.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut setiap suku atau kampung membuat peraturan adat tentang peternakan babi. Pelanggaran atas peraturan adat ini harus membayar denda adat sesuai besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Pemilik ternak babi pun wajib mengkandangkan batinnya. Jika tidak dikandangkan setelah menerima peringatan dari pemilik kebun yang dirusak, maka babi yang merusak kebun harus dipanah hingga mati dan sebuah sidang adat harus dilakukan. Daging babi yang mati dipanah dibagikan kepada warga kampung, dan pemilik ternak babi harus membayar denda keputusan sidang adat yang dapat melonjak hingga 50 hingga 100 juta rupiah.

Sejak Kota Manokwari menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat pada tahun 2003 terjadi perkembangan yang sangat pesat baik dari jumlah penduduk, perekonomian, fasilitas publik, sekaligus permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang disebarkan oleh ternak babi yang dipelihara oleh pemiliknya di dalam kota. Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berupaya untuk melakukan penertiban dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 357 Tahun 2004 mengenai kewajiban mengkandangkan ternak. Sanksi atas pelanggaran peraturan ini

For the people of Papua, pigs are an important animal, both socially and economically. Pigs are a marker of social status for a family and can even be the family's livelihood. In the cultures of Papua, pigs complement various rituals and ceremonies.

Papuan people raise pigs to increase their incomes and for consumption. Compared with other meat consumption, consumption of pork in the town of Manokwari, West Papua, was 58% of total meat consumption in 2006.

The Arfak community (including the Hatam, Meyah, Moile, and Shoub tribes) is the dominant ethnic group in the district of Manokwari and the main source of employment for them is farming and raising pigs. For them, the pig has a socio-cultural value, including as dowry and offerings of peace in customary conflicts. To meet the needs of meat consumption, the Arfak people usually hunt wild boar, deer, snakes, various species of birds, tree kangaroos, or porcupines.

For the Arfak people, pigs are first and foremost property of the community. The pig is an animal first raised by tribal ancestors and serve as a treasure of the Arfak people (Salabai, 2009). The native Papuan pig (*Sus Papuensis*) or wild boars (*Sus Nigra*) have the same high value as a human child being breastfed by his mother. In the villages piglets are even given human breast milk, and are named, held, and bathed, as if human.

As a tool for peace, the Arfak community uses pigs to resolve disputes concerning adultery. According to tribal customs, adultery is strictly forbidden, in the same category as than murder, theft, and elopement. Adultery can result in feuds continued by the offspring of each party and even murder.

To overcome the hostility or conflict caused by adultery, men who commit adultery must prepare a pig in his backyard. The pig is then killed with arrows and machetes and cut to pieces by the victims of the husband or wife. In this way, the emotions of anger from the families are transferred to the pigs to avoid taking them out on a human life. Afterwards, the chiefs of both groups undertake reconciliation efforts and guarantee disputes will not reoccur.

The value of pigs to Arfak society is high because of the dowry function. An Arfak man must submit at least five male pigs as a dowry. Although in the future the pigs will belong to the bride and groom, in a traditional Arfak marriage proposal, the dowry is always given to the mother-in-law in honor of her labor in giving birth to, nurturing, and raising her daughter.

Although high-value, the presence of pigs also causes problems for people, primarily because these animals are not kept in an enclosure. Free to roam, the pigs are often considered pests because of the damage they inflict on plants in the yards and gardens of the population. As a result, conflict often occurs between the owners of a pig and the plantation owners. Conflicts that arise can escalate into a fight between the families and even inter-tribal wars.

In an effort to overcome these problems, each tribe or village has customary rules governing pig husbandry. Violation of these rules leads to fines according to the damage caused. Pig farm owners are obliged to corral their pigs. If not, especially after receiving a warning from the owner of the garden damaged, then the pig responsible is killed by arrows and a customary court session is conducted. The dead pig meat is distributed to villagers, and the pig owner must pay a fine from 50 to 100 million rupiah.

Since the city of Manokwari became the capital of Papua Barat province in 2003, there has been rapid growth of the population, economy, public facilities, and social problems caused by the pigs kept by owners in the city. The Manokwari District Government endeavored to regulate this by Issuing Decree No. 357 2004 regarding the obligation of the citizen to corral livestock. Sanctions for violating this rule are fines, confiscation, and destruction of livestock.

The Manokwari District Government has also given aid in the form of cages and funds for the provision of pig feed.

adalah denda, penyitaan, dan pemusnahan ternak.

Pemerintah Kabupaten Manokwari juga telah membuat beberapa unit kandang dan dana untuk penyediaan makanan babi. Namun implementasi di lapangan belum berjalan dengan baik. Masih banyak ternak babi yang berkeliaran di pasar, jalan raya, dan pemukiman penduduk. Sengketa antara pemilik ternak dengan penduduk sekitarnya ataupun dengan pihak Pemda juga masih sering terjadi.

Persoalannya adalah beternak babi bagi masyarakat Arfak adalah lebih bermotif sosial-budaya dibandingkan dengan motif ekonomi. Oleh karenanya diperlukan pendekatan sosial-budaya dan pendampingan teknis, untuk mendahului penegakan hukum.

INFO LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Dosen Penyuluhan Pembangunan Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPPK), Universitas Negeri Papua (UNIPA). / The writer is a lecturer in the Faculty of Livestock and Fisheries, UNIPA

Alamat Rumah / Address : Jl. Pertanian Gg. Gorong-gorong, Wosi Dalam, Manokwari. Email : mulyadipapua@yahoo.com. HP: 08124834515.

INTERNATIONAL COMMUNITY INTERNATIONAL COMMUNITY

Kerjasama Bappeda - German Development Service di Kabupaten Lombok Tengah-NTB

BAPPEDA - German Development Service Cooperation in Lombok Tengah District, NTB

Oleh Christian Richter

German Development Service (DED) adalah salah satu badan pembangunan untuk kerjasama personil terkemuka di Eropa. DED dibentuk pada tahun 1963 dan sejak saat itu kira-kira 16.000 tenaga ahli pembangunan telah ditugaskan untuk membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Saat ini, sekitar 1.200 tenaga ahli pembangunan aktif tengah bekerja di 48 negara.

Dalam konteks kerjasama pembangunan bilateral, German Development Service mengirimkan tenaga ahli yang berpengalaman, profesional dan mempunyai komitmen sosial ke wilayah-wilayah dan daerah-daerah prioritas terpilih. Para tenaga ahli ini ditempatkan di sana untuk membantu mengentaskan kemiskinan, mewujudkan pembangunan mandiri yang berkelanjutan, meningkatkan kelestarian sumber daya alam, implementasi struktur-struktur yang demokratis dan penanganan konflik-konflik sipil. DED juga mendukung organisasi-organisasi lokal dan berbagai prakarsa mandiri melalui konsultasi teknis, pendanaan program-program kecil, dan promosi tenaga ahli lokal.

DED telah aktif di Indonesia sejak program khusus antuan Rekonstruksi Tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2005. Sebagai hasil dari kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, maka DED Indonesia berkonsentrasi pada tiga wilayah prioritas kerjasama pembangunan yaitu tata pemerintahan yang baik dan desentralisasi, perubahan iklim, dan pengembangan sektor swasta.

Dari kerjasama ini, organisasi-organisasi mitra di Indonesia mendapatkan manfaat melalui konsultasi mendalam dengan tenaga ahli yang dikirim oleh DED dan dalam pembangunan berkelanjutan yang timbal balik. Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, fokus utama kegiatan DED adalah memberikan advis kepada Bappeda dalam beberapa kegiatannya, baik internal maupun eksternal, sesuai kebutuhan dan permintaan Bappeda.

Untuk kegiatan internal Bappeda, DED berpartisipasi dalam memberikan dukungan dalam hal pengelolaan data dan pengetahuan untuk menjaga agar informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman para PNS selama bertugas di Bappeda terdapat dengan baik dan tidak hilang akibat adanya mutasi. Terkait kegiatan ini DED membuat sebuah buku panduan sebagai contoh yang dapat diterapkan di kegiatan lainnya. Buku panduan ini berisi tentang rangkuman semua kegiatan Monitoring &

However, implementation in the field has not gone well. Many pigs still roam the markets, roads, and settlements. Disputes between livestock owners with the surrounding population and with the local government are still common.

The problem is that raising pigs is more socio-culturally rather than economically motivated for the community. Therefore, a socio-cultural approach and technical assistance must precede enforcement.

The German Development Service (DED) is one of the leading development agencies for personnel cooperation in Europe. DED was formed in 1963 and since then approximately 16,000 development experts have been assigned to help improve the living conditions of communities in Africa, Asia and Latin America. Currently, there are approximately 1,200 active development experts working in 48 countries.

In the context of bilateral development cooperation, the German Development Service sends experts who are experienced and professional and who have a social commitment to the regions and selected priority areas. The experts are stationed there to help alleviate poverty, achieve sustainable self-development, and improve the sustainability of natural resources, implementation of democratic structures, and the handling of civil conflicts. DED also supports local organizations and various independent initiatives through technical advice, funding small programs, and promotion of local experts.

DED has been active in Indonesia since the Tsunami Reconstruction Aid Special Programs was created in Aceh and Nias in 2005. As a result of an agreement between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany, DED Indonesia concentrates on three priority areas of development cooperation: good governance and decentralization, climate change, and private sector development.

From this cooperation, partner organizations in Indonesia benefit through in-depth consultations with experts sent by the DED and reciprocal sustainable development. In Central Lombok, West Nusa Tenggara, the main focus of DED is to provide advice to the BAPPEDA in several activities, both internal and external, according to the needs and demands of BAPPEDA.

For internal BAPPEDA activities, DED participates in providing support in data and knowledge management to